

Hadiah/Gratifikasi dan Suap Sebagai Pemahaman Perilaku Korupsi dalam Perspektif Administrasi Publik

Rahmat Salam

University of Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: rahmat.salam@umj.ac.id

Abstrak

Pemberian hadiah sudah umum dilakukan oleh masyarakat seluruh dunia sebagai wujud rasa terima kasih atau kasih sayang seseorang. Ketika terjadi pemberian maupun pertukaran hadiah akan memperkuat ikatan sosial diantara mereka. Akan tetapi jika pemberian hadiah itu memiliki maksud atau tendensi tertentu dan bukan dari pribadi akan tetapi dari sumber yang berasal dari organisasi atau pemerintah maka ada kemungkinan pemberian hadiah itu menjadi suap. Variabel kunci dalam hal ini adalah bukan nilai dari hadiah tersebut akan tetapi keterbukaan transaksinya. Penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan perbedaan pemberian hadiah, gratifikasi dan suap dalam perspektif administrasi publik. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk dapat menggali dan memahami dan membedakan secara analitis berbagai praktek pemberian dan memperjelas konseptual dari makna hadiah dan suap.

Kata Kunci : Hadiah, Suap, Korupsi, Administrasi Publik

A. PENDAHULUAN

Budaya memberikan hadiah sudah menjadi tradisi yang ada sejak dahulu dan dilakukan secara turun-temurun. Mulai dari anak kecil sampai dengan orang tua sangat senang apabila diberikan hadiah sebagai wujud penghargaan, rasa sayang maupun ucapan terima kasih (Mubarok dkk, 2016). Apabila seseorang berprestasi, berjasa atau berhasil mencapai apa yang menjadi cita-citanya pasti akan diberikan penghargaan yang kita kenal

sebagai hadiah. Ataupun ketika seseorang sedang mengadakan acara hajatan seperti pesta ulang tahun, pernikahan biasanya juga diberikan hadiah. Ini merupakan beberapa contoh kecil bagaimana budaya memberi hadiah itu sudah tertanam semenjak dahulu di setiap sendi kehidupan masyarakat (Easter dkk, 2014).

Akan tetapi seiring perkembangan zaman terjadi pergeseran nilai dan makna pemberian hadiah. Jika dahulu pemberian hadiah dimaksudkan

sebagai simbol memelihara hubungan baik, menghargai seseorang dan sebagai bentuk rasa persaudaraan tanpa embel-embel yang di larang oleh norma sosial . Maka sekarang seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat yang semakin maju, pemberian hadiah lebih dimaknai sebagai sesuatu untuk agar seseorang mendapat imbal balik yang sesuai dengan keinginan pemberi hadiah seperti dapat mempengaruhi pemberian keputusan atau mempermudah suatu proses (Butarbutar, 2017). Hal seperti ini yang kita kenal dengan istilah suap. Pengetahuan masyarakat tentang hal ini masih sangat minim sehingga seringkali mereka terjebak. Untuk itu perlu di lakukan sosialisasi secara terus menerus dan berkesinambungan agar mereka terhindar dari perbuatan suap yang merupakan perilaku korupsi (Sukmayeti, 2017).

Umumnya, orang tidak melihat ada salahnya memberi hadiah. Hadiah biasanya dipertukarkan sebagai bagian dari hubungan sosial yang teratur. Di sisi lain, orang hampir secara universal mengutuk suap, menganggapnya tidak diinginkan, berbahaya, dan merusak. Suap

diberikan untuk mempengaruhi hasil keputusan atau hubungan politik, birokrasi, bisnis atau profesional. Hadiah legal, sementara suap illegal (Marbun, 2018).

Hampir semua yang berharga bisa diberikan sebagai hadiah. Meskipun demikian, pemberian tidak harus berupa benda dengan sifat fisik. Ini mungkin datang dalam berbagai bentuk kerja; misalnya, memasak untuk seseorang (Yan, 2012). Saling menguntungkan juga bisa berfungsi sebagai hadiah. Hadiah non-materi atau hadiah balasan tidak selalu datang dari individu. Mereka dapat diprakarsai oleh komunitas atau keluarga, dalam bentuk modal simbolik seperti pengakuan, kehormatan, prestise, atau bangsawan (Schrift, 1997). Misalnya, keramahtamahan tanpa syarat kepada orang asing adalah norma dalam budaya Indonesia di mana timbal balik tidak langsung datang sebagai penghargaan dari komunitas.

Hadiah dan suap adalah institusi yang berfungsi secara sosial dan beroperasi sebagai sistem aturan yang kompleks. Menurut para ahli, baik hadiah maupun suap adalah proses pertukaran informal

yang diatur oleh berbagai sistem aturan (formal dan informal) (Cox & Kousser, 1981). Di luar keunggulan instrumental mereka, keduanya memiliki fungsi sosial penting yang menyatukan kelompok-kelompok sosial di berbagai tingkat masyarakat. Norma universal pemberian hadiah dan penyuapan (1) memicu timbal balik, (2) mengatur proses pertukaran (hadiah / suap), dan (3) menegakkan *quid pro quo*. Menurut para ahli juga, kesamaan normatif ini menunjukkan bahwa hadiah dan suap merupakan jenis perilaku sosial yang sama (Bjørnskov, 2003).

Hadiah selalu mengacu pada makna simbolis yang terkait dengan ikatan sosial antara mitra dan identitas diri pemberi dan sebagai ritual, hadiah membentuk ekspektasi dan perilaku peserta saat ini dan di masa depan. Karenanya hadiah memiliki fungsi komunikatif yang penting. Ini mengirimkan pesan simbolis dari pemberi, yang diinterpretasikan oleh penerima. Hadiah dapat digunakan secara strategis sebagai sinyal niat untuk membangun hubungan dan memperpendek jarak sosial (Komter, 2007).

Tidak semua penyuapan terkait dengan hadiah. Terkadang

suap merupakan transaksi yang lebih instrumental dengan fungsi utama untuk mendapatkan keuntungan langsung dan satu kali bagi peserta. Contoh paling khas dari transaksi korup jenis non-hadiah seperti menyuap polisi lalu lintas, petugas parkir, petugas bea cukai, atau birokrat tingkat jalan lainnya. Mereka biasanya terjadi “di tempat” ketika para aktor tidak mengenal satu sama lain dan kecil kemungkinan mereka akan bertemu lagi di masa depan (Mustofa, 2013). Di sini suap tunai dan tanggapan instan mendominasi transaksi.

Karena norma informal jarang memberikan pedoman, para aktor sendirian selama pertukaran ini. Mereka harus berimprovisasi dan berkomunikasi secara efektif agar berhasil membuat kesepakatan yang korup di tempat. Namun, jika para pelaku tertarik untuk mengulangi kesepakatan korup dengan mitra yang sama, mereka kemungkinan akan mengubah pertukaran mereka menjadi suap jenis hadiah berdasarkan rasa saling percaya dan timbal balik yang tertunda, fitur yang mengurangi risiko deteksi dan mengaburkan sifat korup (Haliim, 2017).

Ketika pegawai negeri mengontrol sumber daya yang

langka seperti penerbitan izin, yang mungkin tidak mereka keluarkan tanpa suap, kita mengalami situasi pencarian sewa. Mereka memiliki atau mereka membuat monopoli. Mencari suap selain gaji mereka tidak menambah nilai, atau menambah produktivitas. Uang cepat, yang digunakan pegawai negeri untuk mempercepat proses, sering kali membuat pejabat pemerintah memeras pembayaran untuk penyediaan layanan apa pun. Perilaku mencari rente ini kemudian menjadi standar pembayaran yang diwajibkan, dan ini menyebabkan inefisiensi yang signifikan, belum lagi merongrong kepercayaan (Soemanto, 2014).

Pemberian hadiah adalah fenomena universal. Ketika hadiah diberikan dalam situasi sosial, apa yang diharapkan sebagai balasannya? Ketika hadiah diberikan dalam kegiatan sektor publik, apa yang diharapkan sebagai imbalan? Kapan hadiah merupakan suap? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab oleh penelitian ini. Dengan melakukan itu, ia mengeksplorasi literatur seputar pemberian hadiah

dan menerapkannya pada konteks administrasi publik.

B. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian kualitatif. Menurut Creswell: "penelitian kualitatif adalah metode untuk menggali dan memahami makna yang menurut beberapa individu atau kelompok orang berasal dari masalah sosial atau manusia." Masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah masalah sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui bagaimana cara menemukan, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penelitian. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, seperti menggunakan observasi mendalam sehingga akan ditemukan pola yang jelas (Creswell & Poth, 2016)..

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Orang-orang bertukar hadiah dalam berbagai pengaturan sosial dan keluarga serta dengan kelompok seperti yang dibahas di atas. Ketika kita beralih ke korupsi, kita dapat mengidentifikasi individu yang korup, kelompok yang korup dan organisasi yang korup (Newburn & Webb, 1999). Ketika hadiah dipertukarkan dengan cara yang mempengaruhi kebijakan publik atau administrasi publik, kita perlu fokus pada dimensi organisasi. Setidaknya satu aktor korup selalu merupakan penghuni kantor publik atau swasta. Korupsi dan penyyuapan adalah tindakan yang sering melibatkan pegawai negeri (Sugiantari, 2017), meskipun korupsi dapat ditemukan dalam konteks yang terorganisir secara formal di pemerintah dan di perusahaan swasta atau di LSM (Siswanto, 2013).

Memasukkan dimensi organisasi dalam analisis dilema hadiah-suap membantu membedakan antara aktivitas yang tampaknya serupa. Transaksi masyarakat-ke-masyarakat melibatkan hadiah di mana afiliasi organisasi mitra tidak relevan. Pemberi yang memulai transaksi, dan penerima yang kemudian membalas, membawa sumber daya mereka sendiri atau kelompok

sosialnya dalam transaksi. Ketika seorang penduduk baru pindah ke lingkungan dan tetangga membawakan mereka kue pulang, dan warga baru sebagai gantinya mengundang tetangga untuk makan siang, itu adalah kasus khas dari transaksi hadiah masyarakat ke masyarakat (Rose-Ackerman, 1998).

Berbeda dengan pola ini, di mana terdapat transaksi masyarakat-ke-birokrasi, seseorang memberikan hadiah kepada anggota organisasi tetapi hadiah balasan “tidak datang dari kantong sendiri” (Michailova & Worm, 2003), tetapi dari sumber daya organisasi publik atau swasta, lalu ada suap. Misalnya, jika seorang pejabat pemerintah menerima hadiah mahal di sebuah pesta, hal itu secara budaya mungkin tidak dianggap sebagai suap, meskipun hal itu mungkin melanggar kode etik organisasinya). Namun jika beberapa bulan kemudian dia membalas hadiah ini kepada keluarga dengan, katakanlah, lisensi pemerintah dia akan mengubah sumber daya organisasi menjadi yang pribadi. Dia akan memperdagangkan otoritas yang dipercayakannya (Lonkila, 1997).

Tukang listrik karyawan yang memasang sistem alarm dan

kamera pengawas di sekolah putrinya secara gratis di waktu kerja, dan menggunakan sumber daya majikannya juga termasuk dalam kategori masyarakat-ke-birokrasi. Ini adalah "korupsi dengan pencurian" pertukaran ketika para aktor mencuri barang-barang organisasi mereka dan, dengan mengikuti norma informal kelompok sosial mereka, mengubahnya menjadi hadiah dan mentransfernya ke anggota kelompok informal (Duggan & Levitt, 2002).

Nilai pertukaran tidak selalu material, dan oleh karena itu, di mana terdapat nilai yang rendah, orang sering tidak menganggapnya sebagai suap. Seorang penata rambut karyawan mungkin menghabiskan lebih banyak waktu untuk menata rambut teman daripada biasanya; montir mobil mungkin memperbaiki beberapa masalah tambahan pada mobil tetangga dan tidak memasukkannya ke dalam tagihan; seorang guru sekolah yang adalah seorang pasien dapat menerima perawatan khusus dari seorang spesialis jantung yang anaknya adalah murid di kelas guru tersebut (Carrier, 1990).

Dalam kasus pertukaran hadiah biasa, peserta membawa

sumber daya mereka sendiri, keluarga atau komunitas, dalam transaksi. Ketika mereka menukar sesuatu yang menjadi milik suatu organisasi, pertukaran hadiah yang normal menjadi suap, kecuali ada pedoman dan transparansi yang jelas. Ada kalanya 'suap birokrasi' bertentangan dengan aturan formal organisasi, namun didukung oleh ekspektasi informal organisasi

Memberi dan menerima hadiah dan keramahtamahan memiliki peran penting dalam memfasilitasi hubungan bisnis jangka panjang. Ini meningkatkan citra perusahaan dan meningkatkan peluang penjualan dan kesepakatan bisnis. Selain itu, penolakan total terhadap pertukaran hadiah perusahaan mungkin merupakan penghinaan di banyak bagian dunia. Di Jepang, tidak memberikan hadiah berkualitas yang dibungkus kepada mitra bisnis baru pada akhir pertemuan pertama mereka dapat menghalangi kesepakatan di masa depan. Pemberian hadiah juga dapat menjadi bagian integral dari strategi pemasaran dan komunikasi organisasi. Pena yang bagus dengan nama perusahaan di atasnya dapat mengingatkan mantan atau mitra bisnis saat ini tentang produk perusahaan (Prabowo, 2014).

Bertukar kado birokrasi memiliki fungsi yang sama dengan pemberian kado antar kerabat, teman, atau kenalan. Ini mengirimkan pesan simbolis, menciptakan niat baik, mengembangkan ikatan sosial dan mengurangi biaya transaksi, risiko dan ketidakpastian, yang berasal dari berurusan dengan orang asing (Hess, 2009). Yang penting, hadiah bisnis juga memiliki efek timbal balik dan seperti hadiah biasa mereka membangun kohesi sosial dengan mensimulasikan institusi informal hadiah dalam lingkungan formal yang terkendali (Green & Alden, 1988). Mereka bertujuan untuk memicu diskriminasi positif oleh pihak lain untuk mendapatkan diskon, harga yang lebih rendah, penundaan pembayaran yang lebih lama dan sebagainya.

Birokrasi pemberian hadiah diatur oleh kode etik organisasi yang memberikan pedoman tentang bentuk, nilai dan ketentuan lain dari hadiah yang diterima. Misalnya, memberi atau menerima hadiah sebelum transaksi besar atau selama proses tender dilarang. Organisasi biasanya membatasi nilai maksimum dari hadiah yang diberikan atau diterima dan memerlukan catatan resmi tentang

transaksi hadiah. Namun demikian, kebanyakan kode menawarkan beberapa kebebasan diskresioner kepada karyawan untuk menilai apa yang dapat diterima dalam pertimbangan budaya (Hess, 2009).

Kita menyeberang ke wilayah yang berbeda saat sumber daya organisasi diperdagangkan untuk mendapatkan hadiah atau keuntungan, dan saat ini dilakukan secara rahasia atau tanpa transparansi. Terkadang ini bisa menjadi kebijakan formal dalam sebuah organisasi, terkadang bisa menjadi praktik informal ketika kebijakan melarangnya.

Hadiah dan suap mengalokasikan kembali sumber daya organisasi untuk memenuhi tujuan organisasi, meningkatkan bisnis, dan menjamin kelangsungan organisasi untuk jangka panjang. Perusahaan farmasi misalnya mensponsori dokter, “perjalanan konferensi” dengan semua biaya ditanggung hingga resor yang menarik. Praktik-praktik ini dikatakan secara signifikan meningkatkan resep obat yang dipromosikan. Pengembang properti yang mengundang pejabat yang bertanggung jawab untuk menyetujui konstruksi, ke makan

siang mewah mengikuti pola yang sangat mirip.

Uang pelicin berupa pemberian kepada pejabat untuk mewujudkan hal-hal yang semestinya terjadi baik secara administratif maupun birokrasi saja. Tanpa pembayaran semacam itu, perusahaan mungkin menghadapi kesulitan serius dalam mengamankan kegiatan bisnis normal. Produk perusahaan mungkin terletak di dermaga pelabuhan asing, dan untuk menghindari pembusukan seluruh kargo, manajer membuat pilihan antara kerugian perusahaan besar atau pembayaran / hadiah kecil untuk memfasilitasi bisnis yang ada (Tsalikis & Nwachukwu, 1991). Apakah itu terjadi hanya sekali, atau apakah itu endemik? Pengaturan seperti itu dengan mudah memicu suap birokrasi. Pola ini melibatkan hadiah di mana sekelompok karyawan melakukan tindakan korupsi atas nama organisasi.

Melintasi batas antara hadiah birokrasi dan suap sering kali diizinkan oleh pimpinan organisasi. Di sini aturan organisasi formal melarang pertukaran sementara norma informal yang disahkan oleh pihak berwenang mengizinkannya. Manajer biasanya tidak secara

langsung mengizinkan pelanggaran aturan tetapi menciptakan iklim etika dan budaya organisasi yang permisif (Breslin & Wood, 2016). Menyiapkan target layanan dan keuangan yang tidak realistis dan menutup mata terhadap alat yang digunakan karyawan untuk membuat kesepakatan adalah cara tipikal untuk memfasilitasi suap birokrasi. Penekanan pada tujuan daripada sarana, didukung oleh insentif yang kuat untuk mencapai hasil mungkin merupakan sinyal jelas dari iklim yang tidak etis. Jika penyuaipan merupakan kebijakan organisasi tidak resmi, praktik tersebut dapat menjadi rutinitas dan tertanam dalam prosedur normal organisasi. Sistem norma informal organisasi membantu menyembunyikan praktik semacam itu. Organisasi memiliki kecenderungan alami untuk menciptakan budaya diam dan menutup-nutupi dunia luar di mana bahkan anggota yang jujur menunjukkan solidaritas dengan rekan mereka yang menyimpang dan korup (Lange, 2008).

Kami memiliki situasi di mana orang selalu bertukar hadiah, dan menimbulkan kewajiban. Kami memiliki sistem birokrasi formal-rasional-legal di mana kantor adalah

unit analisis, tetapi pemegang kantor memiliki kebijaksanaan dan akuntabilitas dan jika ini tidak seimbang, situasi korup ada. Kami memiliki ekspektasi transparansi dalam transaksi, terutama yang melibatkan pertukaran. Semua menyesalkan penyusunan dan korupsi, namun kami menemukan banyak contoh pejabat yang menerima hadiah yang menurut mereka dapat diterima, dan mungkin terkadang memang demikian.

Sejarah politik dan administrasi kita penuh dengan contoh pejabat yang menerima hadiah dan menyangkal adanya *quid pro quo*. Kami memiliki contoh nyata tentang suap di mana birokrat pencari sewa tidak akan melakukan tugas yang diminta tanpa "hadiah". Bagaimana kita mulai menyusun kategori apa yang dapat diterima dan apa yang tidak? Kebanyakan sistem birokrasi memiliki aturan tentang nilai hadiah yang dapat diterima pejabat, dan masih ada kebingungan. Sebagian besar sistem memiliki "register hadiah" yang mendokumentasikan hadiah yang diterima, namun ini seringkali tidak lengkap, atau setelah diselesaikan, jarang diteliti.

Semua ini memiliki relevansi dengan administrasi publik. Pejabat perlu memiliki kebijaksanaan dan perlu terlibat dengan pemangku kepentingan. Menolak secangkir kopi yang dibeli oleh pemangku kepentingan tidaklah masuk akal, begitu pula penolakan untuk menerima makan siang atau seikat bunga. Namun begitu banyak kursus pelatihan tentang integritas organisasi yang berfokus pada jenis acara ini dan membahasnya dengan sangat rinci. Jika seorang pejabat dapat "dibeli" untuk mendapatkan secangkir kopi, dan menyalahgunakan kebijaksanaannya, maka ia tidak akan mendapatkan keuntungan dari lebih banyak aturan atau lebih banyak batasan. Tantangan sebenarnya adalah mengetahui kapan harus menarik garis - makan siang sederhana, makan malam yang tidak terlalu sederhana. Kebanyakan pejabat tahu di mana harus menarik garis. Kuncinya adalah terbuka dan transparan tentang hadiah apa pun.

Intinya kita memiliki empat situasi yang kita sebut, hadiah sosial, suap sosial, hadiah birokrasi, suap birokrasi. Keempat kategori ini semuanya melibatkan beberapa elemen hadiah, dan oleh karena itu

berbeda dari contoh kami di atas (Tentang menyuap polisi lalu lintas) yang jelas merupakan suap - suap non-hadiah. Tipologi kami di bawah ini tidak mencakup fenomena umum suap non-hadiah.

Hadiah sosial adalah pertukaran sumber daya pribadi antara individu atau anggota kelompok sosial dengan fungsi utama memfasilitasi (memelihara, menciptakan, menegosiasikan atau memutus) hubungan sosial dan memperkuat ikatan sosial. Di sini, afiliasi organisasi formal peserta tidak relevan. Meskipun pemberian sosial difasilitasi oleh norma-norma informal, tindakan ini relatif transparan, terlihat oleh anggota kelompok lain dan pihak luar. Biasanya tidak ada yang merugi dari jenis pemberian hadiah ini.

Suap sosial sangat mirip dengan praktik pemberian sosial kecuali di sini setidaknya ada satu pelaku yang memasukkan barang-barang transaksi milik suatu organisasi. Fungsi utama dari tipe pertukaran ini masih bersifat sosial. Dalam hal ini kewajiban dan norma informal yang berasal dari keanggotaan sosial seseorang lebih kuat daripada aturan organisasi dan terkait dengan peran birokrasi formal orang tersebut. Oleh karena

itu, para peserta memandang "mencuri" dari organisasi mereka dapat diterima atau bahkan diinginkan. Sementara komunitas dan individu mendapatkan keuntungan dengan memperkuat ikatan sosial, organisasi kehilangan sumber dayanya. Suap sosial tidak transparan, karena para aktor berusaha menyembunyikan pertukaran dari organisasi.

Hadiah birokrasi adalah bentuk hadiah yang transparan dan diatur secara formal yang mengalokasikan sumber daya organisasi. Ini mencoba untuk mensimulasikan pemberian sosial dengan menciptakan niat baik dan memicu efek timbal balik antara pemegang kantor di birokrasi yang berbeda. Fungsi instrumental utama dari jenis ini adalah untuk memberi manfaat bagi organisasi dengan memfasilitasi transaksi yang lebih lancar dengan organisasi lain. Namun norma timbal balik biasanya lebih lemah dalam konteks organisasi daripada di masyarakat karena orang sering merasa bahwa bantuan yang mereka terima didorong oleh motivasi kalkulatif daripada bantuan yang tulus (Whatley dkk, 1999).

Suap birokrasi melibatkan transaksi jenis hadiah di mana

penerima utama, seperti dalam kasus hadiah birokrasi, adalah organisasi. Di sini, pelanggaran aturan formal difasilitasi oleh norma informal, budaya organisasi yang korup. Meskipun individu juga dapat memperoleh keuntungan dari suap birokrasi, fungsi utama dari transaksi yang tidak transparan tersebut adalah untuk memastikan kelangsungan hidup organisasi. Kontraktor pertahanan yang memiliki mantan perwira militer senior di eselon atas dapat menunjukkan penyuaapan birokrasi, karena dalam memenangkan kontrak besar melalui kontak mereka, organisasi menang dan masyarakat kalah karena pengeluaran publik untuk senjata meningkat tanpa persaingan nyata. Demikian pula, perusahaan yang mungkin memberikan hadiah kepada yayasan pensiunan polisi bisa mendapatkan perlindungan keamanannya dari departemen kepolisian kota dengan persyaratan yang sangat menguntungkan. Atau perusahaan yang mendanai proyek pembaruan perkotaan akan sangat mendukung pemerintah kota yang

dapat membatasi aplikasi pembangunan oleh pesaing, yang masuknya dapat meningkatkan permintaan akan tenaga kerja terampil di daerah tersebut. Dalam contoh suap birokrasi ini, organisasi menang dan masyarakat kalah.

D. KESIMPULAN

Praktik pemberian hadiah dan suap adalah fenomena serupa yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Orang-orang selalu mengedarkan sumber daya melalui pertukaran hadiah untuk menjaga kelompok sosial mereka tetap bersama. Struktur hubungan berbasis kepercayaan ini membantu mengurangi risiko dan ketidakpastian dan menawarkan jaringan keamanan, stabilitas dan makna dalam banyak situasi kehidupan sosial. Antropolog mengungkapkan fitur-fitur bersama dan aspek sosial dan budaya penting dari pembagian hadiah-suap. Hadiah dan suap adalah relatif; mereka mungkin terlihat sangat berbeda dari sudut pandang pihak berwenang dibandingkan dari sudut pandang aktor lokal.

Namun, ada titik kritis di mana hadiah biasa berubah menjadi

suap. Tipologi yang kami tawarkan di sini menunjukkan bahwa dimensi organisasi merupakan faktor penjas penting dalam analisis praktik suap dalam dua cara. Ini membantu memperjelas perbedaan antara hadiah dan suap. Ini juga merupakan alat yang memadai untuk mendeteksi pertukaran jenis hadiah tambahan yang terjadi hanya antara aktor organisasi. Kehadiran sumber daya organisasi dalam transaksi informal merupakan kriteria pembeda antara hadiah dan suap. Selain itu, suap selalu merupakan pertukaran non-transparan yang tersembunyi.

Berbagi sumber daya birokrasi dengan pihak luar yang disukai jelas bertentangan dengan kepentingan organisasi dan kemungkinan mekanisme kontrol organisasi akan mencari dan mendeteksi 'kebocoran' tersebut. Namun dalam kasus praktik pemberian dan suap birokrasi, organisasi mungkin tidak mendeteksi transfer sebagai kehilangan sumber daya. Beberapa organisasi menutup mata terhadap perpindahan dari hadiah ke suap karena mereka melihatnya sebagai investasi untuk masa depan

organisasi. Organisasi lain membangun integritas sehingga mereka dapat mematuhi model birokrasi Weberian sebanyak mungkin dan berinvestasi pada staf mereka untuk membangun integritas dan menangani masalah hadiah / suap dengan cara yang etis dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bjørnskov, C. (2003). *Corruption and social capital*. Aarhus: Aarhus School of Business.
- Breslin, D., & Wood, G. (2016). Rule breaking in social care: hierarchy, contentiousness and informal rules. *Work, employment and society, 30(5)*, 750-765.
- Butarbutar, R. (2017). Modus Operandi dan Pertanggungjawaban Pidana Suap Korporasi. *Jurnal Ilmu Hukum, 4*.
- Carrier, J. (1990). Gifts in a world of commodities: the ideology of the perfect gift in American society. *Social Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice, (29)*, 19-37.
- Cox, G. W., & Kousser, J. M. (1981). Turnout and rural corruption: New York as a test case. *American*

- Journal of Political Science*, 646-663.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Duggan, M., & Levitt, S. D. (2002). Winning isn't everything: Corruption in sumo wrestling. *American Economic Review*, 92(5), 1594-1605.
- Easter, L., Yaqin, M. A., Fatah, A., Purba, L., & Paradisha, N. Z. (2014). Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap pada Undang-Undang Tipikor.
- Green, R. T., & Alden, D. L. (1988). Functional equivalence in cross-cultural consumer behavior: Gift giving in Japan and the United States. *Psychology & Marketing*, 5(2), 155-168.
- Haliim, W. (2017). Perspektif Pertukaran Sosial dalam Perilaku Politik Masyarakat pada Pilkada Kota Malang 2013. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 201-226.
- Hess, D. (2009). Catalyzing corporate commitment to combating corruption. *Journal of Business Ethics*, 88(4), 781-790.
- Komter, A. (2007). Gifts and social relations: The mechanisms of reciprocity. *International Sociology*, 22(1), 93-107.
- Lange, D. (2008). A multidimensional conceptualization of organizational corruption control. *Academy of Management Review*, 33(3), 710-729.
- Lonkila, M. (1997). Informal exchange relations in post-soviet Russia: a comparative perspective. *Sociological Research Online*, 2(2), 71-90.
- Marbun, S. K. (2018). *Studi nalar hadis tentang praktik korupsi, gratifikasi, dan suap* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Michailova, S., & Worm, V. (2003). Personal Networking in Russia and China:: Blat and Guanxi. *European management journal*, 21(4), 509-519.
- Mubarok, J., Hasanudin, H., & Sanrego, Y. D. (2016). Fatwa tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syariah. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 37(2).
- Mustofa, M. (2013). Suap Menyuap dan Mafia Peradilan di Indonesia: Telaah Kriminologis. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(1), 1-5.
- Newburn, T., & Webb, B. (1999). Understanding and preventing police corruption: lessons from the literature.
- Prabowo, R. M. (2014). Fenomena Pergeseran Budaya Pemberian Hadiah (贈答文化 (そうとうぶん

- か)) dalam Tradisi Masyarakat Jepang. *Humaniora*, 5(2), 1122-1133.
- Rose-Ackerman, S. (1998). Bribes and gifts. *Economics, values, and organization*, 296-328.
- Schrift, A. D. (1997). Why Gift?. *s introduction in Schrift, ed., The Logic of the Gift: Toward an Ethic of Generosity. New York: Routledge.*
- Siswanto, D. (2013). Korupsi sebagai bentuk kejahatan transnasional terorganisir. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(1), 123-130.
- Soemanto, R. (2014). Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1).
- Sugiantari, A. A. P. W. (2017). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Penggunaan Wewenang oleh Pejabat Publik. *Jurnal Advokasi*, 7(1).
- Sukmayeti, E. (2017). Redefinisi Suap Dalam Birokrasi Menurut Etika Islam Tentang Risywah.
- Whatley, M. A., Webster, J. M., Smith, R. H., & Rhodes, A. (1999). The effect of a favor on public and private compliance: How internalized is the norm of reciprocity?. *Basic and Applied Social Psychology*, 21(3), 251-259.
- Yan, Y. (2012). The gift and gift economy. In *A Handbook of Economic Anthropology, Second Edition*. Edward Elgar Publishing.